

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perum DAMRI Cabang Bandung sudah memiliki dokumen terkait sistem manajemen keselamatan angkutan umum, namun dari penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa penemuan yang masih belum dimiliki. Dokumen terkait sistem manajemen keselamatan angkutan umum pada masih belum semua dimiliki dimana Perum DAMRI Cabang Bandung masih harus melakukan penyempurnaan dan melengkapi dokumen untuk memenuhi sistem manajemen keselamatan secara lengkap yang harusnya memiliki dokumen terkait yang lengkap
2. Perum DAMRI Cabang Bandung masih memerlukan rekomendasi dan evaluasi terkait 10 elemen yang diterapkan, dimana 10 elemen tersebut masih memiliki kekurangan pada setiap elemen sehingga dibutuhkan evaluasi dan rekomendasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan yang dapat dijadikan patokan sebagai perbaikan pada manajemen keselamatan pada perusahaan.

V.2. Saran

1. Perum DAMRI Cabang Bandung perlu membuat dan memiliki dokumen khusus terkait elemen 1 yang membahas komitmen dan kebijakan yang perlu dilakukan dokumentasi oleh perusahaan.
2. Perum DAMRI Cabang Bandung memerlukan pembuatan dokumen khusus terkait Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam penerimaan pengemudi atau mekanik pada perusahaan.
3. Perum DAMRI Cabang Bandung perlu menerapkan pelaporan terhadap potensi bahaya yang harusnya di dokumentasikan seperti pembuatan form pelaporan dan perusahaan

perlu melakukan penilaian bahaya dan risiko dalam bentuk matrik penilaian.

4. Perum DAMRI Cabang Bandung perlu membuat rencana dan evaluasi dalam peningkatan dan pelatihan pengemudi.
5. Perum DAMRI Cabang Bandung perlu melakukan pelaporan kecelakaan internal yang melewati prosedur khusus serta pengisian form pelaporan kecelakaan internal pada perusahaan.
6. Perum DAMRI Cabang Bandung perlu melakukan monitoring dan evaluasi seperti pembuatan pembuatan dan pengisian form ketidaksesuaian dan form perbaikan yang harus melewati beberapa prosedur khusus yang telah dibuat.
7. Perum DAMRI Cabang Bandung perlu melakukan pengukuran kinerja berkaitan pada keselamatan, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kecelakaan dan indeks keparahana yang bisa saja terjadi saat operasional.
8. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Perum DAMRI Cabang Bandung dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya seperti dalam menggunakan media formulir penilaian yang ada pada penelitian ini agar penilaian lebih rinci dalam melakukan pengecekan sistem manajemen keselamatan dan dapat menilai 10 elemen sistem manajemen keselamatan. 10 elemen yang dapat dinilai yaitu, Komitmen dan kebijakan, Pengorganisasian, Manajemen bahaya dan risiko, Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, Dokumentasi dan data, Peningkatan kompetensi dan pelatihan, Tanggap darurat, Pelaporan kecelakaan internal, Monitoring dan evaluasi, Pengukuran kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- FAUZA, N. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum*.
- Syahrawati. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Di Pt. Triteguh Manunggal Sejati Kabupaten Gowa.
- Ramadhan, A. (2012). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) (Studi Pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng)*.
- Putri, F. R. (2019). *Analisis Faktor Penghambat Penerapan SMK3 di PT. Pelindo Belawan Tahun 2019*.
- Guna, D., Salah, M., & Syarat, S. (2017). *PERHUBUNGAN KOTA MEDAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)*.
- Fitriana, L. (2015). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Pt Ahmadaris Kabupaten Tegal Tahun 2015. *Teknologi Lingkungan*.
- Wuon, A. B. (2013). Analisis Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Kerismas Witikco Makmur Bitung. *Kesehatan Masyarakat*, 3.
- Sumantri, M. S. (2016). Asesmen Dan Intervensi Pedagogik Dalam Membangun Generasi Emas Ditinjau Dari Perspektif Pengembangan Kreativitas Siswa Kelas Awal Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 7(1), 74.
- Tiara, S. K., & Sari, E. Y. (2019). Analisis Teknik Penilaian Sikap Sosial Siswa Dalam Penerapan Kurikulum 2013 Di Sdn 1 Watulimo. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 11(1), 21.

- Toun, N. R., Nufus, H., Amanat, W., Palangkaraya, U. M., Raya, P., & Kalimantan, C. (2015). IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT INFORMASI KONSELING MAHASISWA (PIK-M) BKKBN DI KOTA PALANGKA RAYA
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*, 1–74.
- PP 37. (2017). *PP 37 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum*.
- Islam, M. Y. 2020. *Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Di Po. Nusantara. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tegal*.
- Menteri Perhubungan. 2017. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Jakarta.
- Menteri Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No.98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek*. Jakarta.
- Menteri Perhubungan. 2013. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek*. Jakarta.
- Sugiyono, P. D. 2015. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1982. *Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan*. Jakarta.

*Peraturan Dirjend Perhubungan Darat. Tata Cara Penilaian Sistem
Manajemen Keselamatan Angkutan Umum. (n.d.).*